

Judul : Biaya Kuliah Harus Dijadikan Prioritas
Tanggal : Jumat, 03 September 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Agar Tak Ada Mahasiswa DO

Biaya Kuliah Harus Dijadikan Prioritas

WAKIL Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mendukung tuntutan mahasiswa agar anggaran pendidikan difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan di masa pandemi. Hentikan sementara alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang tidak substantif.

"Poin terpenting saat ini, bagaimana penyelenggaraan pendidikan di level dasar, menengah dan tinggi bisa dilanjutkan. Tidak boleh ada yang putus sekolah, atau mahasiswa *drop out* karena persoalan biaya," ujar Gus Muhaimin, sapaan Abdul Muhaimin Iskandar, saat dialog nasional dengan mahasiswa secara virtual, kemarin.

Dialog bertajuk "Pandemi Tak Henti, UKT Kian Tinggi" ini dihadiri Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Wahyu Suryono Pratama, dan Koordinator Pusat DEMPTKIN se-Indonesia. Dialog itu juga diikuti perwakilan BEM/DEMA dari ratusan kampus di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Muhaimin menguraikan, pandemi memberi dampak luar biasa terhadap setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini juga membuat anggaran negara terkuras untuk pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, serta mengurangi dampak sosial.

Gus Muhaimin meminta Komisi X DPR menyisir anggar-

an pendidikan sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Biaya kuliah harus jadi prioritas, kebutuhan dasar harus diutamakan dibanding kegiatan lain yang tidak relevan pada penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi," tegas Ketua Umum PKB ini.

Gus Muhaimin mengakui, dirinya mendapat banyak laporan dan keluhan soal kesulitan mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Padahal, pemerintah telah mengalokasikan skema bantuan UKT bagi mahasiswa.

"Kami berharap, persoalan UKT segera diselesaikan. Lakukan terus koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Di antaranya melalui Komisi X DPR agar tersampaikan kepada Kemendikbudristek dan rektorat," harapnya.

Gus Muhaimin mengaku kaget saat mengetahui lima mahasiswa di Madura ditahan setelah melakukan unjuk rasa terkait UKT. Dalam waktu dekat, dirinya akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan kasus hukum kelima mahasiswa tersebut.

"Saya akan cek ke Kapolri, agar mereka yang ditahan di Madura segera dibebaskan. Penahanan mereka tidak boleh dilanjutkan, karena harus menjadi pemimpin ide dan gagasan di masa mendatang," imbuhnya.

Selain itu, dia berharap, konsep kuliah *online* terus dimatang-

kan. Sebab, konsep belajar *online*, khususnya untuk pendidikan tinggi akan menjadi sistem yang tidak bisa terpisahkan di masa mendatang.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung pandangan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar soal penggunaan 20 persen dana pendidikan dalam APBN untuk fungsi pendidikan.

Menurutnya, sebagian besar alokasi dana pendidikan saat ini diwujudkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang

belum tentu digunakan untuk fungsi pendidikan.

Dia bilang, refocusing ulang anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN harus ditindaklanjuti. Sebab, dari anggaran itu hanya Rp 85 triliun dikelola Kemendikbud dan sebanyak Rp 55 triliun dikelola Kemenag. Sisanya, Rp 370 triliun dijadikan DAK diserahkan ke pemerintah daerah. "Kami tidak bisa mengontrol penggunaannya," keluh dia.

Huda menambahkan, Komisi-

nya berusaha mendorong Kemendikbud dan Kemenag agar seluruh anggaran fungsi pendidikan dikelola Kemendikbud atau Kemenag. Solusinya, '*Money Follow Student*' agar indeks biaya pemerintah diberikan langsung kepada mahasiswa.

"Kami berharap, konsep *money follow student* bisa diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini sedang dimatangkan di Komisi X," tandasnya. ■ ONI